

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara agraris yang mana sebagian besar penduduknya bermatapencaharian di bidang pertanian. Dengan dianugerahi kekayaan alam yang belimpah ditambah dengan posisi Indonesia yang sangat strategis, mulai dari sisi geologi hingga geografis. Secara geologi Indonesia terletak pada titik pergerakan lempeng tektonik sehingga banyak terbentuk pegunungan yang kaya akan mineral. Daerah perairan di Indonesia yang kaya akan sumber makanan bagi berbagai makhluk hidup seperti tanaman, dan hewan, dan juga mengandung berbagai jenis sumber mineral. Sedangkan dari segi geografis, Indonesia terletak pada daerah tropis yang memiliki curah hujan yang tinggi sehingga banyak jenis tumbuhan yang dapat hidup dan tumbuh dengan cepat. Maka secara astronomi, memberikan keuntungan bagi bumi Indonesia yakni tanaman dapat tumbuh dengan subur¹.

Tidak hanya dikenal sebagai negara agraris, Indonesia juga menjadi negara keenam penghasil tembakau terbesar dunia dengan jumlah rata-rata produksi tembakau sebesar 164.851 ton/tahun². Hasil panen tembakau di Indonesia mampu menyumbang 2,67% daun tembakau dari pasokan global. Alasan utama

¹ Nurul, A., Hardanis, H., dan Poerwono, D. (2013). Analisis Efisiensi Faktor-Faktor Produksi Usahatani Tembakau Rakyat Kabupaten Temanggung. *Diponegoro Jurnal Of Economics*, Vol 3, No 1, Hlm 1-12.

² Nurwiyati, R.T (2017). Peran Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) Dalam Memmpertjuangkan Kepentingan Petani Tembakau Di Kabupaten Temanggung. Jendral Ilmu Pemerintahan.

menempatkan tembakau sebagai komoditi strategis adalah fakta bahwa komoditi ini masih menjadi salah satu sumber pendapatan terbesar bagi keuangan negara. Tembakau masih sangat menjanjikan keuntungan yang besar dari sektor pertanian, industri, perdagangan, serta keuangan. Tembakau sendiri bukanlah tanaman pokok karena tidak tumbuh dan dibudidayakan disemua daerah. Total luas lahan pertanian tembakau di Indonesia mencapai 204.562 hektare pada tahun 2019³. Tembakau terkonsentrasi di tiga provinsi yakni meliputi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Nusa Tenggara Barat, dengan luas lahan di Jawa Timur tahun 2016 sampai 2019 kian meningkat secara signifikan. Pada tahun 2016 luas wilayah pertanian tembakau 64.143 ha, tahun 2017 meningkat menjadi 100.75 ha dan pada tahun 2018 menjadi 105.492 ha dan di tahun 2019 menjadi 105.595 ha. Di Jawa Tengah luas wilayah pertanian tembakau dari 2016 sampai 2019 mengalami kenaikan dan penurunan yakni pada tahun 2016 luas wilayah pertanian tembakau 42.794 ha, pada tahun 2017 mengalami peningkatan menjadi 45.085 ha, pada tahun 2018 mengalami penurunan menjadi 42.362 ha akan tetapi mengalami kenaikan pada tahun 2019 dengan luas lahan mencapai 42.700 ha. Di Provinsi Nusa Tenggara Barat pun juga mengalami kenaikan dan penurunan luas wilayah pertanian tembakau yakni pada tahun 2016 luas wilayah pertanian tembakau 27.178 ha, pada tahun 2017 mengalami kenaikan menjadi 33.793, pada tahun 2018 mengalami penurunan menjadi 32.854 ha, dan mengalami peningkatan pada tahun 2019 dengan luas lahan 33.811 ha (Tabel 1.1). Pada tahun 2016 sampai 2019 dari ketiga provinsi tersebut mengalami peningkatan produksi tembakau secara

³ Direktorat Jenderal Perkebunan. *Luas Tanam Tembakau Menurut Provinsi di Indonesia, 2015-2019*.

signifikan, dan Jawa Timur mengalami peningkatan yang sangat drastis dengan kenaikan hampir 40% pada tahun 2019⁴. (Lihat Tabel 1.1)

Tabel 1. 1 Luas Wilayah Pertanian Tembakau dan Produksi Tembakau Tahun 2015-2019

No	Provinsi	Luas Wilayah Pertanian Tembakau					Produksi Tembakau				
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
1	Jawa Timur	108.542	64.143	100.750	105.429	105.595	99.743	42.191	79.442	84.015	85.053
2	Jawa Tengah	52.470	42.794	45.085	42.362	42.700	40.564	27.924	38.341	34.283	34.006
3	Nusa Tenggara Barat	23.760	27.178	33.793	32.854	33.811	34.449	39.590	43.971	43.778	44.943

Direktorat Jenderal Perkebunan

Namun kenyataannya walaupun Indonesia dikarunia sumber daya alam berlimpah para petani masih mengeluhkan tentang tingkat kesejahteraan yang masih rendah, padahal sektor pertanian merupakan sektor yang mempunyai peranan strategis dalam struktur pembangunan perekonomian Daerah hingga Nasional⁵. Akar persoalan yang meresahkan petani tersebut pada mulanya muncul dari kebijakan Presiden Habibie melalui Keppres Nomor 81 Tahun 1999 tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan. Kebijakan tersebut ditunda, atau belum bisa dilaksanakan, berdasarkan Keppres Nomor 38 Tahun 2001, yang dikeluarkan oleh Presiden Abdurrahman Wahid. Presiden Megawati Soekarnoputri bukan hanya menunda, malah mencabut kedua kebijakan tersebut, dan menggantinya dengan Keppres Nomor 19 Tahun 2004, akan tetapi dicabut oleh presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan mengeluarkan UU Nomor 36 Tahun 2009 yang disebut sebagai UU Kesehatan, yang mengandung ancaman bagi petani

⁴ Direktorat Jenderal Perkebunan. *Produksi Tembakau Menurut Provinsi di Indonesia, 2015-2019*.

⁵ Bonde, D. A. (2019). *Sektor Pertanian Yang Mempengaruhi Perekonomian Daerah Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Kab. Bolaang Mongondow Utara*.

tembakau dan menimbulkan protes secara masal dari kalangan petani tersebut serta dari rangkaian panjang kelompok-kelompok yang berhubungan dengan dunia industri rokok. Maka, Presiden SBY lantas menggantinya dengan RPP Tahun 2009 tanpa mengubah substansinya⁶.

Serasa mendapat tamparan keras di pipi kiri para petani dengan disahkannya PP Nomor 109 Tahun 2012 yang intinya yaitu pembatasan ruang lingkup perokok, tembakau sebagai zat tambahan yang berbahaya bagi kesehatan masyarakat, melakukan pengujian kandungan Nikotin dan Tar untuk setiap batang seluruh jenis varian, serta pembatasan iklan dan sponsor terkait dengan rokok. Dilihat dari segi demokrasi, petani merasa tidak adil sebab petani yang akan dikenai kebijakan tersebut tidak dilibatkan didalamnya, begitu pula dengan sosialisasinya, tidak ada sosialisasi yang melibatkan petani tembakau. Munculnya kesamaan maupun hal serupa dalam PP Nomor 109 Tahun 2012 dengan *Framework Convention Tobacco Control* (FCTC) seperti pasal 8 ayat 2 FCTC dengan Pasal 24 Ayat 2 PP Nomor 109 Tahun 2019, pasal 15 Ayat 1 pada PP Nomor 109 Tahun 2012 juga serupa dengan pasal 11b FCTC. Serangkaian kalimat atau penjelasan yang tampak serupa atau hampir sama dalam PP Nomor 109 Tahun 2012 dengan apa yang terdapat dalam FCTC di atas mendapat perhatian khusus para petani. Munculnya kesamaan-kesamaan tersebut membuat para petani merasakan adanya campur tangan kepatingan politik ekonomi asing⁷.

⁶ Mengutip yang disampaikan oleh Bapak. B (DPD APTI Jateng), pada saat pra penelitian, tanggal 11 November 2019 di Hotel Trio Magelang.

⁷ Sobary, M, *Perlawanan Politik Dan Puitik Petani Tembakau Temanggung*. Jakarta, Kepustakaan Populer Gramedia, 2016, hal 11.

Permasalahan kedua mengenai tren peningkatan Impor tembakau, hal tersebut disebabkan oleh tingginya kebutuhan bahan baku tembakau yang kadar nikotin dan tar rendah (rokok jenis mild) dan belum terealisasikannya Peraturan Menteri Pertanian (PERMENTAN) Nomor 23 tahun 2019 mengenai rekomendasi teknis impor tembakau. Nilai impor tembakau secara keseluruhan pada tahun 2011 mencapai 55.398 ton atau senilai US\$ 262.2 juta⁸. Negara Tiongkok merupakan pengespor terbesar tembakau virginia, mencapai US\$ 118.481 atau (45%) disusul Brazil sebesar US\$ 51.181 atau (19%) dan AS sebesar US\$ 22.198 juta atau (8,5%). Data Impor tembakau dari tahun 2010 sampai 2018 dapat dilihat di (tabel 1.2⁹).

Tabel 1. 2 Impor Tren Peningkatan Impor Tembakau Tahun 2010-2018

Negara Asal	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	Berat Bersih: 000 Kg								
Tiongkok	36.806,70	53.105,00	62.361,10	53.728,30	46.216,80	38.622,50	39.947,20	56.524,40	38.555,90
AS	4.115,50	4.189,50	5.239,50	7.955,30	5.323,90	5.487,20	7.536,20	7.414,70	11.618,60
Turki	4.975,30	7.863,10	6.548,60	6.724,30	5.990,20	5.362,80	5.676,60	3.352,30	4.844,00
Brazil	4.445,80	12.081,10	6.731,90	9.112,80	8.797,60	6.715,30	7.006,10	15.345,90	21.772,60
Zimbabwe	930,6	1.787,00	3.761,80	3.046,60	4.236,80	2.748,50	4.002,20	6.425,10	14.501,70
India	3.732,90	7.877,00	13.703,30	4.251,70	4.415,10	3.259,90	3.818,20	4.499,40	4.127,00
Srilanka	0,0	708	96,8	54,7	229,8	273,9	317,8	233,3	149,4
Italia	154,0	79,2	7.223,10	5.707,30	2.689,80	1.546,40	816	1.238,00	2.180,70
Hongkong	0,0	0	118,1	0	0	1.263,60	69	20	0
Yunani	3.078,70	1.468,70	1.972,60	2.167,90	1.964,30	916,7	66,6	606,4	2.050,60
lain-lain	7.446,00	18.049,10	29.668,90	28.469,30	15.867,70	9.156,20	12.246,10	23.885,40	21.589,00
Jumlah	65.685,5	106.570,5	137.425,7	121.218,2	95.732,0	75.353,0	81.501,9	119.544,9	121.389,5

Sumber :Badan Pusat Statistik

⁸ Markus, S DKK. *Petani Tembakau di Indonesia: Sebuah Paradoks Kehidupan*. Leutikaprio, 2015, hal 29.

⁹ Badan Pusat Statistik. *Impor Tembakau Menurut Negara Asal Utama, 2010-2018*. Diakses dari <https://www.bps.go.id/statictable/2019/02/14/2012/impor-tembakau-menurut-negara-asal-utama-2010-2018.html> tanggal 28 Oktober 2019 jam 14.00 WIB

Semakin meningkatnya impor tembakau dapat menjadi salah satu faktor bagi pemerintah untuk menaikkan tarif impor tembakau. Tarif yang meningkat diharapkan dapat mengurangi konsumsi tembakau impor dan lebih meningkatkan konsumsi tembakau domestik. Berbagai kampanye bahwa konsumsi tembakau yang mengandung nikotin tar rendah di tingkat Nasional dan Dunia menjadikan konsumsi rokok jenis mild semakin meningkat terutama dikalangan perokok pemula. Rokok yang berasal dari tembakau impor sering-kali diklaim memiliki kadar nikotin dan tar yang rendah, sehingga bahan baku yang dibutuhkan untuk produksi rokok jenis mild didalam negri juga semakin meningkat.¹⁰

Apabila kita melihat kembali Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 1999 mengenai batasan tar dan nikotin¹¹, yakni nikotin tidak boleh lebih dari 1,5 mg dan tar tidak boleh lebih dari 3 mg, melihat dari batasan tersebut dirasa oleh petani sebagai jurus dari pedagang global untuk menghancurkan tembakau dalam negri sehingga pada tahun 2000 industri-industri rokok mengikuti regulasi dengan membuat rokok mild. Walaupun Keppres Nomor 81 Tahun 1999 telah dicabut oleh Megawati pada tahun 2003 dengan keluarnya Kepperes Nomor 19 Tahun 2004, tetapi industri telah terlanjur membuat inovasi produk (rokok jenis mild) dan mereka sudah mengumpulkan modal untuk itu. Dengan naiknya rokok mild berbanding lurus dengan impor tembakau saat ini.

¹⁰ Suprihati, A DKK. (2018). Dinamika Konsumsi Rokok Dan Impor Tembakau Indonesia. *SEPA*. Vol 14, No 2, Hlm 183-194.

¹¹ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 1999 Tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan.

Dan pukulan yang langsung mengarah ke uluh hati petani ialah dengan disahkannya 152/PMK.010/2019¹² mengenai penaikan cukai tembakau dan 222/PMK.07/2017¹³ mengenai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT). Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 152 Tahun 2019 yang mengatur kenaikan cukai rokok rata-rata 23 persen per 1 Januari 2020. Disisi Pemerintah, Pemerintah berperan aktif dalam proses penyusunan “Kerangka kerja Organisasi Kesehatan Dunia” yang merupakan hukum internasional yang mengatur pengendalian tembakau yakni *Framework Convention Tobacco Control* (FCTC) dan tidak terlepas dari peran “World Health Organization (WHO)¹⁴, akan tetapi disisi lain petani merasa dirugikan mengenai regulasi tersebut dan merasa ada korporasi Global didalamnya.

Mengenai Tarif Cukai Hasil Tembakau memuat berbagai tarif cukai terbaru berikut harga eceran yang diizinkan pemerintah sesuai PMK 152 tahun 2019 dan akan dijalankan mulai 1 Januari 2020. Jenis rokok pertama adalah Sigaret Kretek Mesin (SKM). SKM golongan I buatan dalam negeri dikenakan cukai Rp. 740 per batang atau gram (sebelumnya Rp590) dan harga jual ecerannya paling rendah Rp. 1.700 /batang atau gram (sebelumnya Rp. 1.120). SKM Golongan II dikenakan tarif cukai Rp. 455 per batang atau gram dengan harga jual paling rendah Rp. 1.020 – Rp. 1.275 per batang atau gram. Jika harga jualnya lebih dari Rp. 1.275

¹² Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 152 /PMK.010/2019, Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146/PMK.010/2017, Tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau

¹³ Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 222 /PMK.07/2017, Tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau.

¹⁴ Sudibyo, op.cit.,hal 3

per batang atau gram, maka cukainya menjadi Rp. 470 per batang atau gram.

Kedua, Sigaret Putih Mesin (SPM). Golongan pertama SPM dikenakan tarif cukai Rp. 790 per batang atau gram dengan harga jual eceran terendah Rp. 1.790 per batang atau gram. Golongan II SPM dikenakan cukai Rp. 470 per batang atau gram dengan harga jual eceran terendah Rp. 1.015 dan tertinggi Rp. 1.485 per batang atau gram. Jika harga jualnya lebih dari Rp. 1.485, maka cukainya menjadi Rp. 485 per batang atau gram.

Ketiga, Sigaret Kretek Tangan (SKT) dan Sigaret Putih Tangan (SPT). Golongan pertama dikenakan tarif cukai Rp. 330 per batang atau gram dengan harga jual eceran terendah Rp. 1.015 – Rp. 1.460 per batang atau gram. Jika harga jualnya lebih dari dari Rp. 1.460 per batang atau gram, maka cukainya naik jadi Rp. 425 per batang atau gram. Golongan II SKT dikenakan tarif cukai Rp. 200 per batang atau gram dengan harga jual terendah Rp. 535 per batang atau gram. Lalu Golongan III-nya dikenakan tarif Rp. 110 per batang atau gram dengan harga jual eceran terendah Rp. 450 per batang atau gram.

Terakhir Sigaret Kretek Tangna Filter (SKTF) dan Sigaret Putih Tangan Filter (SPTF). Jenis rokok ini dikenakan tarif cukai Rp. 740 per batang atau gram dengan harga jual eceran terendah paling rendah Rp. 1.700 per batang atau gram.

Lalu ada juga tarif cukai bagi cerutu. Untuk harga Rp. 495 batas tidak lebih dari Rp. 5.500, ada cukai senilai Rp. 275 per batang atau gram. Di atasnya sampai Rp. 22 ribu ada cukai senilai Rp. 1.320 per batang atau gram. Sampai harga tertinggi Rp. 55.000 dan Rp. 198.000, cukainya senilai Rp. 11.000 dan Rp. 22.000 per batang atau gram. Di atas Rp. 198.000, maka cukainya senilai Rp. 110.000 per batang atau gram. Di luar itu, ada juga Sigaret Kelembak Kemenyan (KLM),

Tembakau Iris (TIS), sampai rokok daun atau KLB yang bisa dilihat pada bagian lampiran III. Untuk rokok yang diimpor, tarif cukai untuk SKM dan SKTF berjumlah Rp. 740 per batang atau gram dengan harga jual terendah Rp. 1.700. Sementara itu, untuk SPM, tarif cukainya Rp. 790 dengan harga eceran terendah Rp. 1.790. Serta untuk SKT atau SPT cukainya senilai Rp. 425 dengan harga terendah. (selengkapnya dapat dilihat pada tabel 3.6)

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 222/07/2017, direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan mengenai alokasi Dana Bagi Hasil (DBH) Cukai Hasil Tembakau (CHT) melihat dari Laporan Pengelolaan DBH CHT Tahun 2018, bahwa penggunaan DBH CHT untuk bidang kesehatan yang mendukung Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sesuai Pasal 2 PMK 222/PMK.07/2017 minimal 50%. Secara nasional menunjukkan realisasi sebesar 58,97% dari total realisasi penggunaan DBH CHT pada tahun 2018¹⁵.

Hal ini janggal bagi para petani di satu sisi pemerintah menekan petani tembakau dengan PP 109 Tahun 2012 ditambah lagi dengan disahkannya PMK 152 Tahun 2019 mengenai kenaikan cukai tembakau dan impor tembakau semakin meningkat akibat kurangnya perhatian pemerintah. Inilah yang menimbulkan resistensi petani tembakau, dimana tembakau yang selama ini ditekan dan diatur dengan berbagai peraturan akan tetapi hasilnya diharapkan oleh Negara yakni menyumbangkan pendapatan dan keuntungan yang besar dengan melihat

¹⁵ Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (2019). *Laporan Pengelolaan DBH CHT 2018*.

realisasi APBN pada tahun 2018 sebesar 58,97% yang digunakan untuk Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dari DBH CHT.

Terutama bagi petani di Kabupaten Temanggung yang merupakan salah satu daerah penghasil tembakau yang potensial di Provinsi Jawa Tengah. Julukan sebagai Kota Tembakau atau yang sering disebut oleh petani Kota penghasil “Emas Hijau”, yang mana hasil dari pertanian ini sebelumnya sangat menguntungkan bagi petani tembakau. Kabupaten Temanggung juga dikenal sebagai “Negeri Tiga Gunung” sebutan yang menggambarkan kebanggaan para warga masyarakatnya karena mereka merasa memperoleh anugerah alam yang tak terhingga itu. Ketiga gunung tersebut terdiri atas Gunung Sumbing, Gunung Sindoro, dan Gunung Perahu yang berhawa dingin. Kondisi itulah yang memungkinkan membuat tembakau dengan kualitas terbaik di dunia berada di Kabupaten Temanggung. Tembakau terbaik di dunia tersebut diproduksi oleh para petani yang menghuni lereng timur gunung Sumbing. Temanggung dan tembakau sebagai satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan. Dari bertani tembakau, sebagian besar masyarakat Temanggung bergantung pada komoditi tembakau sehingga dapat mencukupi kebutuhan hidupnya.

Tembakau merupakan hasil bumi yang cukup menjanjikan bagi para petani karena harga jual yang tinggi membuat sebagian besar masyarakat yang tinggal di desa maupun lereng gunung memilih berprofesi sebagai petani tembakau. Mayoritas perkebunan tembakau tersebut terdapat di wilayah yang berada di lereng gunung. Lokasi-lokasi tersebut sangat sesuai digunakan untuk perkebunan tembakau karena berada di dataran tinggi, lereng gunung di Temanggung yang

menghadap ke arah timur sehingga mendapatkan penyinaran yang baik di pagi dan siang hari, unsur hara dalam tanah yang baik serta suhu yang optimal sangat baik untuk tanaman tembakau.

Hasil Produksi perkebunan tembakau merupakan salah satu sumber pemasukan terbesar di Temanggung. Tembakau Srinthil adalah salah satu tembakau berkualitas terbaik yang merupakan produk asli Indonesia yang dihasilkan daerah Temanggung. Bahkan jenis tembakau tersebut sudah mendapat Sertifikat Indikasi Geografis dari Kementerian Hukum dan HAM. Data luas panen, dan produksis tanaman tembakau di Kabupaten Temanggung berdasarkan data dari Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan dapat dilihat di Tabel 1.3.

Tabel 1. 3 Luas Panen, Produksi dan Produktifitas Kabupaten Temanggung 2016-2018

No	Kecamatan	Luas Panen			Produksi		
		2016	2017	2018	2016	2017	2018
		Ha	Ha	Ha	Kg	Kg	Kg
1	Ngadirejo	2.404,45	2.214,00	2.235,00	1.382,51	1.553.960	1.629.250
2	Kandangan	302,58	67,50	156,00	169,18	40.500	9.360
3	Parakan	1.190,35	843,00	1.388,00	707,03	444.810	882.700
4	Kledung	2.132,75	2.090,00	2.060,00	1.246,53	1.781.045	1.465.300
5	Kaloran	86,50	198,40	68,00	58,71	79.360	34.000
6	Gemawang	7,60	17,00	15,00	4,24	8.651	808
7	Tlogomulyo	1.834,45	1.864,00	1.143,00	1.052,83	1.089.944	532.200
8	Wonobojo	1.002,25	455,00	901,00	570,98	395.600	640.370
9	Kranggan	701,30	10,00	26,00	39,68	3.500	11.700
10	Tretep	1.069,70	973,00	1.231,00	609,41	-	861.700
11	Bulu	2.198,80	2.128,50	2.039,00	1.333,90	1.392.039	1.040.000
12	Jumo	757,15	624,00	732,00	435,35	427.710	353.000
13	Bansari	1.314,80	1.261,79	1.346,00	774,01	929.416	116.600
14	Tembarak	1.399,35	861,40	1.028,00	804,60	516.840	353.000
15	Temanggung	254,60	268,00	471,00	147,73	264.248	359.800
16	Candiroto	921,50	925,00	1.010,00	539,37	680.200	770.900
17	Selopampang	637,45	466,00	445,00	363,16	297.050	233.180
18	Kedu	665,00	792,20	422,00	382,36	-	220.000
19	Pringsurat	-	-	-	-	-	-
20	Bejen	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH	18.879,08	16058,79	16716,00	10.611,58	9.904.873	9.513.868

Sumber: DINTAPANGAN Kabupaten Temanggung

Pentingnya perundang-undangan tentang Pertembakauan merupakan faktor penting dalam mensejahterakan petani tembakau itu sendiri, sehingga peran pem-

erintahpun ikut andil didalamnya. salah satu masalah terkait kebijakan pemerintah adalah disahkannya PP Nomor 109 Tahun 2012¹⁶ tentang Pengamanan Produk yang mengandung zat adiktif berupa tembakau bagi kesehatan. PP ini menyatakan tembakau sebagai candu (zat adiktif) yang berbahaya bagi kesehatan masyarakat, sehingga perlu melakukan pengujian kandungan Nikotin dan Tar setiap batang dan setiap varian yang diproduksi, sehingga menambah biaya produksi rokok serta mempersempit ruang gerak pemasaran serta tekanan perdagangan yang semakin meningkat, yakni dengan pembatasan iklan dan sponsor terkait dengan rokok. Hal ini dipandang oleh petani sebagai kecenderungan berpihak pemerintah terhadap kepentingan asing, Gerakan protes pun dilakukan petani untuk mengkritisi maupun memberikan opini terhadap kebijakan yang mengancam kesejahteraan petani tembakau¹⁷.

Berdasarkan uraian diatas, McCarthy dan Zalt (1997) mengungkapkan bahwa struktur mobilisasi adalah kemampuan sejauh mana gerakan dan sosial melebur dengan aksi kolektif dengan taktik gerakan dan organisasi gerakan sosial. Sehingga, dengan adanya Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) Kabupaten Temanggung merupakan organisasi profesi dimana mayoritas kaum petani tembakau yang bertujuan sebagai penyampai pesan/penghubung antara petani dengan pemerintah dan sebagai penampung aspirasi bagi kelompok tani di Kabupaten Temanggung, diharapkan dapat berperan (aktif) terhadap apa yang

¹⁶ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2012 Tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan

¹⁷ Yustika, Ahmad Erani DKK. *OPINI AKADEMIK Atas Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 Tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan*, Jakarta. Serikat Kerakyatan Indonesia, hal 161.

terjadi pada petani tembakau, serta dengan berbagai program-program tepat sasaran guna meningkatkan kesejahteraan petani tembakau di Kabupaten Temanggung maupun upaya yang dilakukan dalam memperjuangkan kepentingan petani tembakau di Kabupaten Temanggung dapat terwujud. APTI dapat dikatakan sebagai bagian dari proses menuju keadaan lebih baik dan lebih maju, setiap program pemberdayaan yang dilakukan APTI adalah usaha untuk mengantarkan petani kepada keadaan yang lebih baik dan sejahtera.

Penelitian ini akan memfokuskan diri pada peran serta strategi yang digunakan oleh Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) Kabupaten Temanggung dengan menggunakan teori gerakan sosial yang dikategorikan Sidney Tarrow menjadi 4 elemen, yakni: a). Tantangan Kolektif, b). Tujuan Bersama, c). Solidaritas dan Identitas Kolektif, d). Memelihara Politik Perlawanan. Didalam perlawanan memperjuangkan hak petani yang terancam oleh regulasi pengendalian tembakau yang tidak berpihak kepada petani dan merugikan petani tembakau pada skala nasional hingga lokal, serta bagaimana proses mobilisasi yang dilakukan APTI Kabupaten Temanggung dengan menggunakan teori Zald & McCarthy (1977) yakni: a) Peran Pemimpin/ Kaum profesional (*movement professionals*), b) Tekanan (*pressure*). Penelitian ini menjadi lebih menarik dan berbeda dengan penelitian-penelitian terdahulu terkait perlawanan petani karena peneliti mencoba membedah isu-isu mulai dari skala Nasional hingga lokal, serta isu-isu didalam Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) yang ada di Kabupaten Temanggung. Sehingga bisa menjabarkan permasalahan petani tembakau dari hulu hingga hilir.

Perlawanan petani tembakau selama ini memang memiliki lawan yang cukup berat rupaya, sebab melihat dari apa yang dijelaskan peneliti diatas terdapat regulasi pengendalian terbakau yang khusus mengatur mengenai tembakau mulai dari hasil tembakau hingga mengatur mengenai proses penjualan, kemudian presentase kenaikan cukai yang melonjak tinggi ditiap tahunnya, presentase pembagian DBH CHT baik skala Nasional hingga skala Lokal tidak mencerminkan keberpihakan pemerintah kepada para penghasil cukai tersebut yang hanya memperoleh sisa dari apa yang dihasilkan dari penjualan hasil tembakau, serta tercium bau-bau korporasi yang melibatkan skala Global, Elit politik, maupun pemangku kebijakan di Negara tercinta ini.

Selama ini APTI Kabupaten Temanggung telah melakukan berbagai aksi mulai dari beraudiensi dengan pemangku kebijakan, memaksimalkan kesempatan politik yang ada, hingga aksi massa yang dilakukan agar RRU pertembakauan dapat segera disahkan menjadi UU Pertembakauan, agar PMK 152 Tahun 2019 bisa di revisi kembali maupun di cabut dan yang utama penolakan atas Kawasan Tanpa Rokok di Kabupaten Temanggung dimana tertuang dalam PP 109 tahun 2012¹⁸. Yang pertama, pada tanggal 16 November 2016 ratusan petani tembakau yang tergabung dalam Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, bertolak menuju Jakarta, bertujuan untuk beraudensi

¹⁸ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2012 Tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan, Bagian Kelima , Kawasan Tanpa Rokok , Pasal 49, Dalam rangka penyelenggaraan pengamanan bahan yang mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau bagi kesehatan, Pemerintah ,dan Pemerintah Daerah wajib mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok.

atau menyampaikan aspirasi kepada ketua DPR RI¹⁹. Yang kedua, pada hari senin tanggal 9 Januari 2017 ratusan petani tembakau dari Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) dari berbagai wilayah di Jawa Tengah, dengan mengerahkan 12 bus dan truck berisikan 700 petani tembakau menggelar aksi demonstrasi di depan kantor Gubernur Jateng, Jalan Pahlawan, Kota Semarang²⁰. Yang ketiga, pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2017 Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) Temanggung mengadakan doa bersama dan pemasangan baliho berisi tulisan "Petani tembakau menuntut segera disahkan RUU Pertembakauan" dan "Tolak impor tembakau dari luar negeri untuk kesejahteraan petani tembakau", tuntutan petani tembakau yang dilaksanakan di sebelah timur Jembatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah²¹. Yang keempat, hari kamis tanggal 24 Oktober 2019 belasan petani tembakau mengatasnamakan Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) Kabupaten Temanggung menuju Jakarta dan melakukan aksi damai didepan Istana dengan menyampaikan aspirasi serta membentangkan sepanduk bertuliskan "Pak Presiden Kasihani Kami Petani Tembakau". Belasan petani yang melakukan aksi tersebut sebagai simbol jeritan petani tembakau serta menyampaikan keberatan atas kenaikan cukai yang mana

¹⁹ Ratusan Petani Tembakau Temanggung Ke Jakarta Temnui DPR. Diakses dari (<https://jateng.antaranews.com/berita/154813/ngluruk-ke-jakarta-petani-desak-pengesahan-ruu-pertembakauan>) tanggal 29 Oktober 2019 jam 13.00 WIB

²⁰Ratusan Petani Tembakau di Jateng Demo Desak RUU Pertembakauan Segera Disahkan. Diakses dari (<http://jateng.tribunnews.com/2017/01/09/ratusan-petani-tembakau-di-jateng-demo-desak-ruu-pertembakauan-segera-disahkan>) Tanggal 29 Oktober 2019 jam 13.30 WIB

²¹ APTI Desak Pemerintah DPR Tetapkan Regulasi RUU Pertembakauan. Diakses dari (<http://lintasterkini.com/18/03/2017/apti-desak-pemerintah-dpr-tetapkan-regulasi-ruu-pertembakauan.html>) Tanggal 29 Oktober 2019 jam 13.30 WIB

kenaikan cukai tersebut berdasarkan PMK 152 tahun 2019²². Yang kelima, pada hari senin tanggal 11 November 2019 Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) Kabupaten Temanggung beserta petani tembakau dari 10 Provinsi di Indonesia mengadakan Rapat Pimpinan Nasional mengenai kenaikan cukai serta dampak PMK 152 Tahun 2019 yang dihadiri Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Perwakilan Kementerian Pertanian dan Perwakilan Kementerian Beacukai²³. Diadakannya pertemuan tersebut merupakan penyatuan aspirasi dari berbagai petani tembakau di Indonesia mengenai keresahan para petani akan regulasi pemerintah. Dan yang terakhir, pada hari Senin tanggal 2 Desember 2019 di halaman Kantor Sekda Kabupaten Temanggung, Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) melakukan aksi damai dengan menyuarkan aspirasi petani tembakau dengan melibatkan lebih dari 500 petani dan Laskar Kretek Kabupaten Temanggung terkait dengan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) yang akan diterapkan di Kabupaten Temanggung²⁴. Berdasarkan uraian diatas, sehingga perlu menganalisa bagaimana peran Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) dalam melindungi kepentingan petani tembakau di Kabupaten Temanggung dan eektivitas yang dilakukan Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) Kabupaten Temanggung.

²² Cukai Rokok Tahun Depan Naik 21,55 Persen, Petani Tembakau Protes. Diakses dari <https://www.inews.id/finance/makro/cukai-rokok-tahun-depan-naik-2155-persen-petani-tembakau-protos> Tanggal 15 November 2019 jam 08.30 WIB

²³ Di Magelang, Asosiasi Petani Tembakau Tolak Kenaikan Harga Rokok. Diakses dari <https://www.solopos.com/di-magelang-asosiasi-petani-tembakau-tolak-kenaikan-harga-rokok-1030360> Tanggal 15 November 2019 jam 09.30 WIB

²⁴ Kunjungan tim Kemenko PMK di Temanggung disambut demo petani. Diakses dari <https://www.antaraneews.com/berita/1189487/kunjungan-tim-kemenko-pmk-di-temanggung-disambut-demo-petani> tanggal 3 Desember 2019 jam 18.30 WIB

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijabarkan di atas, peneliti merumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut “Bagaimana Mobilisasi Yang Dilakukan Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) Kabupaten Temanggung dalam memperjuangkan hak-hak petani tembakau ?”

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

a. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran serta strategi yang dilakukan Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) Kabupaten Temanggung dalam melindungi dan memperjuangkan kepentingan petani serta dampak yang terjadi berdasar PP Nomor 109 tahun 2012 khususnya pada pasal 49 yakni pemerintah daerah Kabupaten Temanggung akan menerapkan Kawasan Tanpa Rokok, Tren Impor tembakau, PMK 222 Tahun 2017 dan PMK 152 Tahun 2019.

b. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Berfungsi sebagai salah satu metode pembelajaran tentang gerakan sosial yang dilakukan Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) Kabupaten Temanggung merupakan suatu upaya kolektif untuk mengejar suatu kepentingan bersama atau gerakan mencapai tujuan bersama untuk mencapai yang menjadi cita-cita bersama. Serta

menjadi bahan referensi bagi peneliti selanjutnya dan juga sebagai bahan pembanding bagi penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

- a) Penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan kepada aparaturnya pemerintah pusat maupun daerah khususnya pihak-pihak yang menangani dan bergelut dalam merancang maupun mengesahkan UU yang terkait dengan Tembakau seperti PP 109 Tahun 2012, FCTC, permasalahan impor tembakau, dan juga PMK 152 Tahun 2019, khususnya dalam mengambil keputusan meyakinkan masyarakat terkait didalamnya.
- b) Sebagai bahan informasi untuk mengetahui program-program APTI dalam hal ini tentang program maupun aksi yang dilakukan Asosiasi petani Tembakau Indonesia (APTI) Kabupaten Temanggung.

1.4 Literature Review

Dalam penelitian ini peneliti tentunya merujuk pada beberapa penelitian yang sudah ada sebelumnya sehingga menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian dan juga sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian pada penelitian penulis. Berikut merupakan penelitian terdahulu berupa beberapa jurnal terkait dengan penelitian yang dilakukan penulis :

Tabel 1. 4 Literature Review

No	Judul dan Penulis	Temuan
----	-------------------	--------

1.	<p>Peran Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (Apti) Dalam Memperjuangkan Kepentingan Petani Tembakau Di Kabupaten Temanggung.</p> <p>(Sugyati, 2017)</p>	<p>Dalam penelitian tersebut ditemukan bahwa perjuangan APTI dalam menyampaikan aspirasinya agar bisa diakomodir oleh pemerintah melakukan beberapa pendekatan yakni kepada para anggota dewan maupun pemimpin daerah, dengan begitu suara aspirasi para petani dapat diwakili /tercurah sebagai suara dewan Kabupaten Temanggung²⁵.</p>
2.	<p>Bentuk Dan Mekanisme Pemberdayaan Oleh Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) Guna Mendukung Ketahanan Ekonomi Petani Tembakau di Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah.</p> <p>(Nuryanti, Subejo, & Guntoro, 2019)</p>	<p>Dalam penelitian tersebut ditemukan bahwa: pertama dilihat dari pemberdayaan yang dilakukan APTI Temanggung memberi dampak positif bagi anggota, tetapi kemandirian secara individu petani tembakau yang mengarah pada ketahanan sosial ekonomi masih relatif rendah. Keduabentuk pemberdayaan yang dilakukan APTI Temanggung melihat dari semua program pemberdayaan dapat dikategorikan sebagai fasilitasi dengan mekanisme pada masing-masing program berbeda-beda.²⁶</p>
3.	<p>Investigasi Advokasi Pengendalian Tembakau di Indonesia: Studi Kasus TCSC Jawa Timur.</p> <p>(Yusuf, 2016)</p>	<p>Dalam penelitian tersebut ditemukan bahwa berbagai kegiatan advokasi pengendalian tembakau TCSC Jawa Timur dipengaruhi dan dibentuk dalam bentuk relasi Donor dan NGO,s, dan Jejaring non pemerintah TCSC Jawa Timur terutama lembaga filantropi di tingkat global yang paling berperan dalam membentuk serta</p>

²⁵ Nurwiyati, R. T. (2017). Peran Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) Dalam Memperjuangkan Kepentingan Petani Tembakau Di Kabupaten Temanggung. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*.

²⁶ Nuryanti DKK (2017). Bentuk Dan Mekanisme Pemberdayaan Oleh Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) Guna Mendukung Ketahanan Ekonomi Petani Tembakau di Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*. Vol 24, No 3, Hlm 374-388.

		mempengaruhi advokasi pengendalian tembakau. ²⁷
4.	Gerakan Sosial Petani Kedungdendeng (Studi Kasus: Gerakan perlawanan petani terhadap BKPH Ploso Barat Dusun Kedungdendeng Desa Jipurapah Kabupaten Jombang) (Adi, 2017)	Dalam penelitian tersebut ditemukan bahwa perlawanan yang dilakukan oleh petani dengan menggunakan jalur hukum dan bikrasi tidak melibatkan pihak BKPH Ploso Barat sebagai pihak yang secara legal memiliki kewenangan tersebut, tetapi melibatkan pihak ketiga yakni dari agrarian atau pertanahan Mojokerto yang sudah mengeluarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) yang mana pihak tersebut merupakan bagian institusi negara ²⁸ .
5.	Prospek Dan Tantangan Usahatani Tembakau Madura (Hasan & Darwanto, 2016)	Dalam penelitian tersebut ditemukan bahwa terdapat beberapa alternative yang diberikan agar tidak terganggu oleh PP No.109 tahun 2012 yakni dengan cara yang pertama mengganti tanaman tembakau, yang kedua melakukan budidaya tembakau yang rendah nikotin, yang ketiga mengolah tembakau menjadi minyak atsiri ²⁹ .
6.	Dinamika Konsumsi Rokok Dan Impor Tembakau Indonesia (Suprihanti & DKK, 2018)	Dalam penelitian tersebut menunjukkan impor tembakau Indonesia tahun 2018-2020 diperkirakan meningkat rata-rata 3 persen per tahun. Tarif impor pada dasarnya akan berakibat pada meningkatnya harga tembakau yang harus dibayar oleh perusahaan rokok, namun dalam

²⁷ Yusuf, Muhammad R (2016). Investigasi Advokasi Pengendalian Tembakau di Indonesia: Studi Kasus TCSC Jawa Timur. *Jurnal Analisis Hubungan Internasional*. Vol 5, No 2, Hlm 438-449.

²⁸ Adi, Angga P (2017) Gerakan Sosial Petani Kedungdendeng (Studi Kasus: Gerakan perlawanan petani terhadap BKPH Ploso Barat Dusun Kedungdendeng Desa Jipurapah Kabupaten Jombang). *Program Studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu politik Universitas Airlangga*.

²⁹ Hasan, Fuad dan Darwanto, Dwidjono H (2013) Prospek Dan Tantangan Usahatani Tembakau Madura. *SEPA*. Vol 10, No 1, Hlm 63-70

		<p>aplikasinya kenaikan tarif impor masih menimbulkan perdebatan di kalangan pengusaha rokok. Saat ini tarif impor tembakau masih dikategorikan rendah yakni (5%) mengingat masih tingginya kebutuhan tembakau impor untuk industri rokok di dalam negeri³⁰.</p>
7.	<p>Modal Sosial Petani Tembakau untuk Peningkatan Kesejahteraan Sosial (Fatwa Nurul Hakim dan Gunawan Wibisono, 2017)</p>	<p>Dalam penelitian tersebut ditemukan bahwa Social Networking, Norm of Trust, Reciprocity dan Mutual Benefit yang dimiliki petani tembakau di Desa Legoksari menjadi kekuatan utama dalam keberlangsungan pertanian tembakau³¹.</p>
8.	<p>Pendelegasian Kewenangan Dalam Pengelolaan Hutan Studi Kasus Kelompok Tani Hutan (KTH) Kemasyarakatan Sedyo Makmur Kecamatan Semanu, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta (Rijal Ramdani, 2019)</p>	<p>Dalam penelitian tersebut ditemukan bahwa peran pemerintah sendiri dirasa belum cukup mampu dari segi Implementasi maupun Deliveri imputnya sehingga keterlibatan NGO,s dalam melakukan pendampingan mampu membuat masyarakat memiliki social capital dan dengan adanya social capital mampu membangun kerjasama/seinergi antara masyarakat, pemerintah, dan NGO,s.³²</p>
9.	<p>Di Balik Keberlanjutan Sawit: Aktor, Aliansi Dalam Ekonomi Politik Sertifikasi Uni Eropa. (Erwiza Erman,2017)</p>	<p>Dalam penelitian tersebut ditemukan bahwa lancar atau tidak lancarnya ekspor minyak sawit ditentukan dengan adanya sertifikat sawit GLOBAL (RSPO), namun actor-aktor Negara indoneisa dan Malaysia tidak terkooptasi dengan sertifikat RSPO</p>

³⁰ Suprihati, Antik DKK (2018) Dinamika Konsumsi Rokok Dan Impor Tembakau Indonesia. *SEPA*. Vol 14, No 2, Hlm 183-194.

³¹ Hakim, Fatwa Nurul dan Wibisono, Gunawan (2017) Modal Sosial Petani Tembakau untuk Peningkatan Kesejahteraan Sosial. *PKS*. Vol 16, No 4, Hlm 369-380.

³² Ramdani, Rijal (2016) Pendelegasian Kewenangan Dalam Pengelolaan Hutan: Studi Kasus Kelompok Tani Hutan (KTH) Kemasyarakatan Sedyo Makmur Kecamatan Semanu, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*. Vol 1, No 2, Hlm 118-131.

		dan membuat sertifikasi tandingan yakni di Indonesia dengan (ISPO) sedangkan di Malaysia dengan (MSPO) dalam menghadapi politik diskriminatif Parlemen Uni Eropa. ³³
10.	Sektor Pertanian Yang Mempengaruhi Perekonomian Daerah Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Kab. Bolaang Mongondow Utara. (Bonde, 2019)	Dalam penelitian tersebut ditemukan bahwa kebijakan pemerintah serta kerjasama antara pemerintah dengan sektor swasta dan juga masyarakat yang ikut andil) dalam meningkatkan sektor perekonomian daerah untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, mandiri dan berbudaya sesuai dengan visi misi daerah dan juga sesuai dengan julukan yang dijuluki sebagai kabupaten padi ³⁴ .

Berdasarkan uraian-uraian jurnal diatas, yang menjelaskan tentang gerakan sosial, peran *civil society*, dan beberapa jurnal terkait dalam memperjuangkan kepentingan petani melalui aksi masa, advokasi, maupun kegiatan pemberdayaan petani dengan berbagai macam program, terdapat juga beberapa peneliti yang meneliti Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) Kabupaten Temanggung seperti penelitian yang dilakukan Sugyati tentang Peran Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) Dalam Memperjuangkan Kepentingan Petani Tembakau Di Kabupaten Temanggung. Sugyati meneliti tentang cara yang dilakukan APTI Kabupaten Temanggung dalam memperjuangkan RUU pertembakauan, dengan hasil penelitian tersebut adalah menggerakkan sumber

³³ Erman, Erwiza (2017) Di Balik Keberlanjutan Sawit: Aktor, Aliansi Dalam Ekonomi Politik Sertifikasi Uni Eropa. *Masyarakat Indonesia*. Vol 43, No 1, Hlm 1-13.

³⁴ Bonde, Devita A (2019) Sektor Pertanian Yang Mempengaruhi Perekonomian Daerah Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Kab. Bolaang Mongondow Utara. *ReasearchGate*.

daya, dan dukungan tenaga, massa secara berkala melakukan kunjungan ke Jakarta dan melakukan pertemuan untuk berdiskusi dengan anggota DPR RI, selanjutnya APTI dari berbagai wilayah di Jawa tengah, melakukan aksi massa di Kota Semarang. Secara efektifitas perjuangan yang dilakukan APTI dalam memerjuangkan RUU pertembakauan belum berjalan secara efektif, hal ini disebabkan karena faktor internal dan eksternal dari kelompok kepentingan tersebut.

Sedangkan penelitian yang dilakukan Nuryanti, Dkk menfokuskan penelitian tentang Bentuk Dan Mekanisme Pemberdayaan Oleh Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) Guna Mendukung Ketahanan Ekonomi Petani Tembakau di Kabupaten Temanggung, dengan hasil penelitian tersebut secara garis besar dikelompokkan menjadi 4 program yakni : a) Program Kredit Usaha Mandiri Pertanian Tembakau (KUMPT), b) Program pemberdayaan APTI DPD Jateng peduli pendidikan, c) Program pembimbingan pendampingan dan pembinaan petani tembakau, dan, d) Program pemberdayaan APTI yang utama adalah advokasi regulasi tentang pertembakauan. Kedua penelitian tersebut secara garis besar membahas mengenai peran, bentuk dan mekanisme pemberdayaan yang dilakukan Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) di Kabupaten Temanggung.

Selain kedua penelitian tentang Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) di Kabupaten Temanggung yang sudah dijelaskan sebelumnya, penelitian lain yang berkaitan dengan topic penelitian peneliti adalah penelitian yang dilakukan oleh Adi tentang Gerakan Sosial Petani Kedungdendeng terhadap

BKPH Ploso Barat. Adi meneliti tentang bentuk perlawanan petani Kedungdendeng dalam reclaiming tanah milik Badan Kesatuan Pemangkuan Hutan (BKPH), dengan hasil peneliti menunjukkan proses perlawanan yang dilakukan petani Kedungdendeng mengarah pada bentuk perlawanan secara meja hijau (hukum) dan setelah mediasi yang difasilitasi oleh Pemerintah Kabupaten Jombang selanjutnya pihak ketiga yakni agrarian atau pertanahan Mojokerto yang telah mengeluarkan SPPT, tepatnya pada tahun 2014.

Sedangkan penelitian yang dilakukan Fatwa, N. Dkk tentang Modal Sosial Petani Tembakau untuk Peningkatan Kesejahteraan Sosia. Fatwa meneliti tentang modal sosial petani tembakau dalam mendukung kegiatan pertanian untuk peningkatan kesejahteraan, hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa terbentuknya Gabungan Kelompok Tani (gapoktan) sebagai social networking: modal sosial petani tembakau berupa ritual selamatan mengolah tanah, tembakau dan tasyakuran sebagai norm of trust: relasi sistem kerja sebagai reciprocity: dan jimpitan sewu-selawe, saling pinjam tenaga kerja, pembagian hasil panen, kesetiakawanan sosial, adanya CSR beasiswa Djarum Foundation sebagai mutual benefit untuk keluarga petani tembakau guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Legoksari.

Berdasarkan penjelasan diatas maka hal yang membedakan dengan penelitian peneliti adalah penelitian yang dilakukan peneliti berfokus pada peran serta strategi Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) Kabupaten Temanggung dalam melindungi kepentingan petani tembakau mulai dari regulasi-regulasi pemerintah yang merugikan petani yakni PP 109 Tahun 2012 tentang

penerapan KTR yang akan diterapkan di Kabupaten Temanggung pada akhir tahun 2019, Peraturan Menteri Pertanian No 23 Tahun 2019 mengenai Rekomendasi Teknis Impor Tembakau yang sampai saat ini belum di realisasikan, PMK 222 Tahun 2017 yang mana minimal 50% hasil DBH CHT diperuntukan untuk program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), PMK 152 Tahun 2019 mengenai kenaikan cukai yang akan dilaksanakan mulai tanggal 1 Januari 2020, serta mencoba mengangkat isu-isu pertembakauan skala Nasional yakni regulasi pengendalian tembakau hingga isu-isu yang ada didalam Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) Kabupaten Temanggung, serta isu-isu petani tembakau di Kabupaten Temanggung yang mana terdapat kelas-kelas petani tembakau didalamnya sehingga berdampak juga pada tata niaga pertembakauan di Kabupaten Temanggung.

1.5 Kerangka Dasar Teori

Kerangka teori merupakan kemampuan seorang peneliti dalam proses penelitian secara sistematis dimaksudkan untuk memberikan gambaran atau batasan-batasan tentang teori-teori yang mendukung permasalahan peneliti.

Menurut Kerlinger (1995) teori adalah seperangkat *konstruk* (konsep), batasan dan proposisi yang menyajikan suatu pandangan sistematis tentang fenomena dengan merinci hubungan-hubungan antar variabel dengan tujuan menjelaskan dan memprediksi gejala tersebut. Batasan tersebut mengandung tiga hal, yang pertama, sebuah teori adalah seperangkat proposisi yang terdiri atas konstruk-konstruk yang terdefiniskan dan saling berhubungan. Yang kedua, teori

menyusun antar hubungan seperangkat variable (konstruk) dan dengan demikian merupakan suatu pandangan sistematis mengenai fenomena-fenomena yang dideskripsikan oleh variabel-variabel itu. Akhirnya suatu teori menjelaskan fenomena. Penjelasan itu diajukan dengan cara menunjuk secara rinci variabel-variabel tertentu yang berkait dengan variable-variabel tertentu lainnya³⁵.

Dari penjelasan diatas peneliti memberi kejelasan pada penelitian ini dengan teori-teori yang digunakan peneliti adalah Gerakan Sosial, *Civil Society*, dan Kesejahteraan Masyarakat.

1.5.1 Gerakan Sosial

Kajian-kajian tentang gerakan sosial pada umumnya mengacu pada gerakan sosial lama yang dibangun oleh Karl Marx (Marxist), pendekatan secara kritis merupakan cara dialektis dengan menganalisis dominasi, ekonomi politik, eksploitasi, maupun ideology dimana menurut Marx dan Engels bahwa perkembangan peradaban masyarakat tidak dapat dilepaskan dari sejarah perjuangan kelas. Sejalan dengan Spencer yang dimaksud dengan “*social movement*” yaitu upaya kolektif yang ditunjukkan untuk suatu perubahan tatanan kehidupan baru. Gerakan sosial, baik kelompok gerakan sosial lama (Marxist) maupun gerakan sosial baru (post-marxist), menjadi kajian kritis atas analisa tindakan kolektif.

Gerakan sosial ditujukan untuk menganalisis masalah sosial (*social problem*) dalam rangka melakukan perubahan sosial (*social change*).

Perubahan melalui gerakan sosial, diselaraskan dengan kritik kebijakan dan

³⁵ Bambang A.S. (2014) Perbedaan Model Dan Teori Dalam Ilmu Komunikasi. *HUMANIORA*. Vol 5, No 2, Hlm:1152-1160.

mobilisasi gerakan (*mobilization of movement*). Korelasi atas kebijakan dan mobilisasi gerakan dilihat dari aspek: tekanan gerakan, opini publik, kekuatan kelompok gerakan, dan tingkat inovasi kebijakan. Kerangka kerja yang dibangun diarahkan melakukan negosiasi pemahaman, membuat atribusi, dan mendesak untuk mempengaruhi perubahan. Teori-teori yang biasanya identik dengan gerakan sosial lama dengan bercirikan berbasis kesamaan profesi, mengandalkan kekuatan massa dan stratifikasi kelas social seperti: 1) William Korhauser (teori kesamaan massa), 2) Teori Deprivasi Relatif, 3) Karl Marx (Teori Dominasi Kelas), dan 4) Teori Korporatokrasi³⁶.

Sedangkan Gerakan sosial baru menurut Rajendra Singh (2010) menggaris bawahi, bahwa dalam periode GSB aliran utamanya yaitu teori mobilisasi sumber daya (*resources mobilization theory*) yang muncul di Amerika Serikat dan dipengaruhi oleh pemikiran Mancur Olson (1965), Oberschall (1973), McCarthy dan Zald (1977), Gamson (1975), Charles Tilly (1975) dan Tarrow (1982). Sebagaimana pendekatan mobilisasi sumberdaya dipengaruhi dari kontribusi pembentukan gerakan, proses mobilisasi, organisasi gerakan sosial, dan hasil dari penolakan³⁷.

Hank Johnston, Enrique Larana, dan Joseph R. Gusfield (1994) membagi gerakan sosial dalam 2 (dua) bentuk, yakni: Gerakan Sosial Lama (*old social movement*), dan Gerakan Sosial Baru (*new social movement*) sebagai basis mobilisasi. Gerakan sosial lama (*old social movement*) sering dikaitkan dengan pendekatan Marxism. Meski secara eksplisit, pendekatan Marxism tidak

³⁶ Susanto, Ari. *Membumikan Gerakan Sosial Islam Progresif*. Yogyakarta, Semesta Ilmu, 2017, hal 42.

³⁷ Ibid, hal 50-53.

banyak menyinggung istilah “gerakan”, posisi “gerakan” pada gerakan sosial lama terpusat pada struktur, ideologi, budaya, dan perlawanan. Prosedur analitis dalam memahami gerakan sosial dan revolusi tetapi membutuhkan suatu mekanisme yang disebut tindakan kolektif³⁸.

Sebagaimana perhatian Marxism pada kelas sosial yang kemudian menimbulkan bentuk protes sosial, ini dianggap sebagai manifestasi dari gerakan sosial. Dalam pendekatan strukturalisme, gerakan sosial bermuara pada hak-hak sipil, anti-perang, kiri baru, dan aktivis buruh. Aktivitas semacam ini yang kemudian dipandang sebagai aspirasi “politik gaya lain”. Sedangkan kondisi struktural dan perubahan sosial dalam gerakan sosial baru memiliki posisi yang penting³⁹.

Blummer (1969) mengategorikan gerakan sosial berdasarkan tipologi gerakan, tujuan, dan metode gerakan dengan dua kategori yakni gerakan sosial umum (*general social*), dan gerakan sosial khusus (*specific social movement*). Sedangkan Macionis⁴⁰ memberikan 4 (empat) Tipologi gerakan sosial yakni:

- 1) Gerakan sosial alternatif ,
- 2) Gerakan sosial pembebasan,
- 3) Gerakan sosial reformis, dan
- 4) Gerakan sosial revolusi.

³⁸ Ibid, hal 53-54.

³⁹ Ibid, hal 52-53.

⁴⁰ Ibid, hal 42-43.

Tahapan ini ditandai adanya agitasi tak terorganisir hingga mengkristal pada struktur gerakan sosial. Struktur tersebut menurut Sidney Tarrow⁴¹ (1982) dapat dikategorikan dalam 4 (empat) elemen penting, yakni:

1) Tantangan Kolektif (*Collective Challenge*)

Sebuah aksi kolektif bisa dikatakan sebagai sebuah gerakan sosial apabila dalam dinamikanya selalu diikuti oleh tantangan-tantangan untuk melawan para elit, pemegang otoritas, maupun terhadap kelompok-kelompok lain bahkan perlawanan terhadap norma-norma dan aturan suatu budaya. Biasanya Gerakan sosial yang ditandai dengan tantangan kolektif memiliki perlawanan berupa slogan, corak pakaian, dan musik sebagai pergerakan mereka. Tantangan kolektif muncul sebagai sarana menciptakan konstituen yang akan diwakili demi mendapatkan perhatian dari lawan dan pihak ketiga.

2) Tujuan Bersama (*Common Purpose*)

Terdapat banyak alasan mengapa akhirnya individu bergabung dengan gerakan sosial. Alasan-alasan tersebut berbeda-beda tergantung dengan pertimbangan individu masing-masing. Namun, jika dilihat secara konseptual alasan paling jelas mengapa individu bergabung dalam gerakan sosial adalah untuk menyusun klaim bersama menentang pihak lawan, pemegang otoritas ataupun para elit.

⁴¹ Ibid, hal 42.

3) Solidaritas dan Identitas Kolektif

Sebuah gerakan sosial hanya dapat terbentuk apabila terdapat perasaan yang mengakar mengenai solidaritas atau identitas. Hal ini juga yang menjelaskan bagaimana nasionalisme dan etnis yang berdasar pada hal nyata atau bahkan “imajinasi” sekalipun lebih dapat diandalkan daripada kelas sosial dalam konteks organisasi gerakan pada masa lampau. Gerakan sosial lahir didasari pada sesuatu yang menggerakkan secara bersama-sama (common denominator) yang awalnya hanya sekedar potensi dan imajinasi menjadi sebuah aksi nyata. Terkait hal ini perancang gerakan memainkan peran dalam menciptakan sebuah konsensus semacam itu.

4) Memelihara Politik Perlawanan

Gerakan bersama untuk melawan salah satu pihak berpotensi menjadi gerakan sosial. Memelihara politik perlawanan dalam kaitannya dengan gerakan sosial menjadi salah satu poin penting, tujuan yang diinginkan bersama harus dijaga agar arah gerakan tidak berubah menjadi suatu kebencian dan kemarahan yang dilepaskan tanpa memahami arah dari perlawanan. Untuk memelihara politik perlawanan dengan menggunakan sikap kritis dan waspada terhadap suguhan informasi, melakukan riset dengan sikap kritis agar tidak terlibat dalam propaganda yang akan merugikan diri atau kelompok.

Dengan demikian gerakan sosial perlu dibedakan dengan aksi-aksi kolektif. Setidaknya gerakan sosial memiliki empat properti dasar yang ditawarkan Sidney Tarrow diatas. Gerakan sosial juga dilakukan dengan penuh pertimbangan dalam pembentukannya dan orang-orang yang terlibat didalamnya.

Situmorang (2007) dalam disertasinya yang berjudul “Gerakan Sosial: Teori dan Praktik”. Urgensi gerakan sosial baru ini dapat dipahami dari empat ciri utamanya⁴², yaitu:

- 1) Memandang dan menempatkan aktivitas gerakan sosial sebagai sebuah aksi kolektif yang rasional dan memiliki nilai positif.
- 2) Memperbaiki dan mengkontekstualisasikan teori-teori gerakan sebelumnya ke dalam era kekinian.
- 3) Semakin banyaknya riset dan studi gerakan sosial di negara-negara di luar Amerika Utara dan Eropa Barat yang membuat kajian gerakan sosial semakin kaya.

Mobilisasi Sumberdaya

Menjelang pertengahan 1960’an, paradigma mobilisasi sumber daya (*resource mobilization paradigm*) muncul sebagai terobosan besar dan secara praktis menyingkirkan ambiguitas yang muncul dalam model ketegangan structural selama ini. Para teoritis yang berdiri dalam garis utama pemikiran ini adalah Mancur Olson, 1965, dan para pengikutnya seperti Anthony

⁴² Rahman, Abd (2016). Gerakan Sosial Masyarakat Peduli Lingkungan. *Jurnal Equilibrium*. Vol 3, No 2. Hlm 175-184.

Oberschall, 1973, McCarthy dan Zald, 1977, Gamson, 1975, Charles Tilly, 1975, Tarrow, 1982 dan lain-lain. Paradigma mobilisasi sumber daya memusatkan perhatian gerakan masyarakat pada proses sistem mobilisasi yang terorganisir secara lebih rasional dan yang lebih mengikuti perkembangan jaman, baik dari segi karakteristik, peran bahkan bentuk-bentuk gerakan yang diambil oleh para konstituen sebagai anggota dari gerakan sosial baru pada masyarakat kontemporer. Untuk menjadi efektif, tindakan-tindakan ini hampir selalu harus dilakukan oleh organisasi-organisasi gerakan⁴³.

Elemen-elemen kunci dari setiap gerakan adalah organisasi-organisasi gerakan bukan individu-individu. Dengan demikian, agar sistem mobilisasi itu dapat dijalankan secara optimal dan dapat berhasil dengan baik maka pergerakan dalam organisasi diperlukan seorang pemimpin, yang oleh Zald & McCarthy (1977) disebut kaum profesional (*movement professionals*). Kaum profesional ini memainkan peranan penting dalam sebuah organisasi gerakan, karena menjelang akhir abad kedua puluh semua masyarakat adalah masyarakat yang bercirikan organisasi⁴⁴.

Ciri masyarakat yang berorganisasi adalah bahwa setiap tindakan bagi suatu perubahan sosial menuntut keahlian teknis tingkat tinggi, khususnya dalam mengelola sumber-sumber daya, merencanakan strategi, menghimpun dana, melakukan tekanan (*pressure*) terhadap kelompok elit dan mengadakan kontak dengan media massa⁴⁵.

⁴³ Ari.op.cit., hal 47.

⁴⁴ Ibid,

⁴⁵ Ibid, hal 47-78.

Dalam menjelaskan gagasan sentralnya menyangkut keberadaan kepentingan kolektif, Tilly dan rekan-rekannya (1975) sepakat bahwa perubahan-perubahan dalam masyarakat mempengaruhi gerakan sosial. Pergeseran utama dari struktur kekuasaan lokal ke nasional membawa akibat kepada organisasi dan bentuk gerakan sosial. Secara umum, studi-studi gerakan sosial di Indonesia banyak mengacu pada kerangka teoritis dari pandangan Rajendra Singh, yang mana menurut Singh peta teori gerakan social terdiri dari: (1) Klasik, (2) neo-klasik dan (3) Gerakan Sosial Baru⁴⁶.

Secara khusus, Tarrow (1988) mengamati perubahan politik di Eropa menjadi pokok penelitiannya dengan menganalisis lingkaran-lingkaran protes yang sudah terjadi didalam masyarakat Italia Kontemporer. Dengan metode penelusuran arsip-arsip surat kabar guna mengidentifikasi insiden-insiden protes sosial dan berbagai aksi kolektif yang terjadi didalam masyarakat. Sehingga ketika diarsipkan dalam jangka waktu yang cukup panjang menghasilkan data base yang besar.

Dan menurut Anthony Oberschall, Teori mobilisasi sumberdaya memfokuskan perhatiannya pada proses-proses sosial yang memungkinkan muncul dan berhasilnya suatu gerakan. Teori ini berasumsi bahwa faktor penting kelompok melakukan mobilisasi karena memiliki jaringan komunikasi yang sudah mapan, terdapatnya anggota dengan kemampuan kepemimpinan dan adanya partisipasi tradisional dari anggotanya. Selain itu, dalam kelompok juga

⁴⁶ Febriani, Luna (2017). Mobilisasi Sumberdaya dalam Gerakan Literasi (Studi Pada Gerakan Vespa Pustaka). *Jurnal Society*. Vol 5, No 1. Hlm 61-67.

terdapat pemimpin, anggota, terdapat pertemuan, kegiatan rutin, rantai sosial, dan berbagai kepercayaan, simbol serta bahasa yang sama⁴⁷.

Sehingga, secara sederhana dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor determinan dalam suatu gerakan sosial menurut teori mobilisasi sumberdaya, yakni:

- 1) Organisasi gerakan sosial, merupakan sistem nilai bersama, perasaan dari komunitas, norma tindakan dan struktur organisasi.
- 2) Pemimpin dan kepemimpinan, pemimpin didefinisikan sebagai pembuat keputusan strategis yang menginspirasi dan mengorganisasikan orang lain untuk berpartisipasi, sedangkan kepemimpinan adalah kemampuan untuk mempengaruhi kelompok melalui pencapaian tujuan.
- 3) Sumberdaya dan mobilisasi sumberdaya, terdapat lima tipe sumberdaya dalam gerakan sosial, yakni: sumberdaya moral, sumberdaya kultural, sumberdaya organisasi sosial, sumberdaya manusia dan sumberdaya material,
- 4) Jaringan dan partisipasi, jaringan sosial merupakan faktor pelekak bagi sebagian besar anggota dalam berbagai organisasi.
- 5) Peluang dan kapasitas masyarakat. perspektif ini mengacu pada kemampuan masyarakat lokal untuk mengorganisir suatu tindakan kolektif.

⁴⁷ Ibid.

Strategi Gerakan Sosial

Sebagai upaya melihat strategi gerakan sosial sebenarnya tidak bisa dapat dibatasi oleh teori dan konsep tertentu secara baku. Hal ini dikarenakan dalam melihat strategi gerakan sosial harus dilihat dari konteks terkait ruang dan waktu dimana serta kapan sebuah gerakan sosial lahir serta berkembang. Strategi gerakan sosial biasanya berkembang berdasarkan improvisasi oleh aktor-aktor yang terlibat didalamnya, serta dipengaruhi oleh faktor politik, sosial, dan budaya yang ada pada wilayah gerakan tersebut berkembang.

Meskipun demikian setidaknya ada dua teori dasar yang dapat digunakan sebagai acuan dalam menjelaskan strategi gerakan sosial, yaitu;

- 1) *Protest Politics* : dapat diartikan sebagai strategi dalam bentuk memobilisasi dukungan dengan cara mengorganisir protes terbuka diruang public.
- 2) *Information Politics* : Dimaknai sebagai mengumpulkan dan menyebarkan informasi secara strategis guna mempengaruhi pendapat umum⁴⁸.

⁴⁸ Ari.op.cit., hal 44.

1.5.2 Civil society

Istilah *civil society*, yang kini sering diterjemahkan dengan masyarakat kewargaan atau masyarakat madani, tampaknya semakin mendapat tempat di dalam wacana politik di Indonesia. Harus diakui, bahwa pemahaman atas terminologi tersebut masih akan terus berkembang dan karenanya persilangan pendapat menjadi tidak terelakkan. Namun kiranya hal ini wajar, mengingat hal serupa juga terjadi di negara-negara yang sudah lebih lama mengenal dan menggunakan *term* tersebut, baik di dalam wacana ilmiah maupun keseharian. Justru dengan keragaman sintesis-sintesis baru dan gagasan-gagasan orisinal diharapkan muncul, sehingga bisa menyumbangkan pemahaman yang lebih baik untuk konteks Indonesia⁴⁹.

Sebagai sebuah konsep, *civil society* menurut Victor Perez dan Diaz lebih menekankan pada suatu proses sejarah yang tak terputuskan, artinya keadaan masyarakat yang telah mengalami pemerintahan yang terbatas, kebebasan, ekonomi pasar dan timbulnya asosiasi-asosiasi masyarakat yang mandiri, dimana satu sama lainnya saling menopang. Selanjutnya, Christopher Bryant memberi makna pada *civil society* sebagai sebuah masyarakat yang memiliki peradaban (*civility*) yang dibedakan dari masyarakat yang tidak beradab atau barbarian. Sedangkan Nicos Mouzelis berpendapat bahwa *civil society* merupakan sebuah tatanan social, dimana ada perbedaan yang jelas antara

⁴⁹ Gaffar, Afan. *Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi*. Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 1999, Hal 175-177.

bidang individu dan *bidang* publik, dan terjadi tingkat mobilitas sosial yang tinggi dari warga masyarakat⁵⁰.

Menurut AS Hikam *civil society* mempunyai 3 ciri khusus yaitu⁵¹ :

- 1) Kemandirian yang cukup tinggi dari individu-individu dan kelompok dalam masyarakat,
- 2) Adanya ruang publik bebas sebagai wahana bagi keterlibatan politik secara aktif dari warga Negara demi kepentingan public,
- 3) Adanya kemampuan membatasi kuasa Negara agar tidak intervensionis dan otoriter.

Di Indonesia yang banyak diharapkan dapat memainkan peranan mengisi ruang publik dalam *civil society* adalah kalangan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) artinya organisasi atau asosiasi yang berada di luar sektor Negara, mereka mencakup organisasi ketetanggan yang kecil, lokal hingga organisasi-organisasi berbasis keanggotaan berorientasi nasional serta bersifat bebas dan independen. Peran *civil siceity* dalam mengisi peranan ruang publik yakni dalam proses pembentukan kebijakan seperti Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Walhi, dan lain-lain, maupun kelompok kepentingan yang bersifat konvensional seperti yang berasal dari kalangan Islam yakni Muhammadiyah

⁵⁰ Ibid, hal 177-178.

⁵¹ Ibid, hal 148-149.

dan Nahdlatul Ulama, atau yang berasal dari kalangan gereja Kristen dan Katolik⁵².

Kehadiran masyarakat madani yang kuat akan menjadi alat kontrol terhadap kekuasaan negara, dan negara harus menyediakan tempat bagi eksisnya masyarakat madani⁵³. Negara tidak mempunyai alasan untuk mendikte masyarakat agar mau mengikuti kehendaknya, karena kehadiran masyarakat madani merupakan entitas yang terlepas dari pengaruh negara (*political society*). Antara negara (*state*) dan masyarakat (*society*) harus terjadi *check and balance* dalam mencapai kehidupan politik yang demokratis. Dalam sistem demokratis, pemerintah menjalankan kekuasaan berdasarkan nilai-nilai keadilan, tunduk dan taat serta patuh kepada hukum, dengan berpegang pada keadilan dan kepatuhan dan tunduk kepada hukum kehidupan bernegara berjalan diatas kepentingan masyarakat dan bukan berdasarkan segelintir kepentingan kelompok dan individu.

1.5.3 Kesejahteraan sosial

Secara harifah, kesejahteraan masyarakat atau sosial mengandung arti yang luas dan mencakup berbagai segi pandangan atau ukuran tertentu. Menurut Undang-undang No 11 Tahun 2009 Bab 1 Pasal 1 Ayat 1 tentang Kesejahteraan Sosial, Kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi

⁵² Ibid, hal 192-195.

⁵³ Alam, Bachtier. (2006). Antropologi dan Civil Society: Pendekatan Teori Kebudayaan. *ANTROPOLOGI INDONESIA*. Vol 30, No 2. Hlm 193-200.

sosialnya⁵⁴. Kesejahteraan sosial dapat pula disebut sistem yang terorganisir dari pelayanan-pelayanan sosial dan lembaga-lembaga yang bertujuan untuk membantu individu dan kelompok untuk mencapai standar hidup dan kesehatan yang memuaskan dan relasi-relasi pribadi dan sosial⁵⁵.

Menurut Amartya Sen, kesejahteraan adalah proses kebebasan yang sejati yang dapat dirasakan oleh semua pihak, yaitu jika seseorang bisa menghidupi dirinya atau keluarganya dan berpikir dalam suasana tidak tertekan, dan setiap orang harus mempunyai kebebasan dalam menjalankan hidupnya sendiri yaitu dengan memperoleh hak-haknya. Selain itu, seseorang dapat menggunakan akal pikirannya dengan baik yaitu memiliki kebebasan untuk berpikir dan menyampaikan pendapat sesuai dengan keinginannya tanpa ada rasa takut. Instrumental kebebasan terdiri dari lima jenis yakni : 1) kebebasan politik, 2) kesempatan-kesempatan dalam bidang ekonomi, 3) kesempatan-kesempatan dalam bidang sosial, 4) jaminan adanya keterbukaan, dan 5) jaminan keamanan⁵⁶.

Sejalan dengan Amartya Sen, Soeharto mendefinisikan kesejahteraan sosial juga termasuk sebagai suatu proses atau usaha terencana yang dilakukan oleh perorangan, lembaga-lembaga sosial, masyarakat maupun badan-badan

⁵⁴ Undang-Undang No 11 Tahun 2009 Bab 1 Pasal 1 Ayat 1 Tentang Kesejahteraan Sosial.

⁵⁵ Notowidagdo, R. *Pengantar Kesejahteraan Sosial Berwawasan Iman Dan Takwa*. Jakarta, AMZAH, 2016, hal 56.

⁵⁶ Indro, Nur. (2013). Kemiskinan Global Dalam Perspektif 'Development as Freedom' Amartya Sen Kasus: Indonesia. *Jurusan Hubungan Internasional, Universitas Katolik Parahyangan*.

pemerintah untuk meningkatkan kualitas kehidupan melalui pemberian pelayanan sosial dan tunjangan sosial⁵⁷.

Selanjutnya Schneiderman, mengemukakan tiga tujuan utama dari sistem kesejahteraan sosial yang sampai tingkat tertentu tercermin dalam semua program kesejahteraan sosial, Berikut penjelasannya⁵⁸:

- 1) Pemeliharaan Sistem Pemeliharaan dan menjaga keseimbangan atau kelangsungan keberadaan nilai-nilai dan norma sosial serta aturan-aturan kemasyarakatan dalam masyarakat, termasuk hal-hal yang berlian dengan definisi makna dan tujuan hidup; motivasi bagi kelangsungan hidup seseorang dan kelompok. Kegiatan sistem kesejahteraan sosial untuk mencapai tujuan semacam itu meliputi kegiatan yang diadakan untuk sosialisasi anggota terhadap norma-norma yang dapat diterima.
- 2) Pengawasan Sistem Melakukan pengawasan secara efektif terhadap perilaku yang tidak sesuai atau menyimpang dari nilai-nilai sosial. Kegiatankegiatan kesejahteraan sosial untuk mencapai tujuan semacam itu meliputi; mengintensifkan fungsi-fungsi pemeliharaan berupa kompensasi, (re)sosialisasi, peningkatan kemampuan menjangkau fasilitas-fasilitas yang ada bagi golongan masyarakat yang memperlihatkan penyimpangan tingkah laku.

⁵⁷ Maspaitella dan Rahakbauwi. (2014). Pembangunan Kesejahteraan Sosial: Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pendekatan Pekerja Sosial. *Aspirasi*, Vol 5, No 2, Hlm 157-164.

⁵⁸ D A, Augerah, DKK. (2019). Arisan Rumah Sebagai Upaya Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus Di Desa Tambahrejo Barat, Gading Rejo, Pringsewu, Lampung). *Jurnal Pendidikan Sosiologi*. Hal 1-16.

- 3) Perubahan Sistem Mengadakan perubahan kearah berkembangnya suatu sistem yang lebih efektif bagi anggota masyarakat. Dalam mengadakan perubahan itu, sistem kesejahteraan sosial merupakan instrumen untuk menyingkahkan hambatan-hambatan terhadap partisipasi sepenuhnya dan adil bagi anggota masyarakat dalam pengambilan keputusan.

Secara Konsep, Sennet, Cabb dan Conway menyatakan bahwa ketidakberdayaan yang dialami oleh sekelompok masyarakat merupakan akibat dari proses internalisasi yang dihasilkan dari interaksi mereka dengan masyarakat. Faktor-faktor tersebut yakni⁵⁹:

- 1) Ketiadaan jaminan ekonomi,
- 2) Ketiadaan dukungan finansial,
- 3) Ketiadann pelatihan-pelatihan, dan
- 4) Adanya ketegangan fisik maupun emosional.

Sedangkan menurut Kolle, kesejahteraan dapat diukur dari beberapa aspek kehidupan antara lain:

- 1) Dengan melihat kualitas hidup dari segi materi, seperti kualitas rumah, bahan pangan dan sebagainya,
- 2) Dengan melihat kualitas hidup dari segi fisik, seperti kesehatan tubuh, lingkungan alam, dan sebagainya,

⁵⁹ Maspaitella dan Rahakbauwi (2014). Pembangunan Kesejahteraan Sosial: Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pendekatan Pekerja Sosial. *Aspirasi*, Vol. 5 No. 2, Hlm 157-164.

- 3) Dengan melihat kualitas hidup dari segi mental, seperti fasilitas pendidikan, lingkungan budaya, dan sebagainya, dan
- 4) Dengan melihat kualitas hidup dari segi spiritual, seperti moral, etika, keserasian penyesuaian, dan sebagainya.

Kemudian Fahrudin menjelaskan bahwa kesejahteraan sosial memiliki fungsi-fungsi yakni⁶⁰:

- 1) Fungsi pencegahan (*Preventive*) Kesejahteraan sosial ditujukan untuk memperkuat individu, keluarga, dan masyarakat agar terhindar dari masalah masalah sosial yang baru.
- 2) Fungsi Penyembuhan (*Curative*) Kesejahteraan social ditujukan untuk mennghilangkan kondisi-kondisi ketidakmampuan fisik, emosional, dan sosial agar orang yang mengalami masalah tersebut dapat berfungsi kembali secara baik dalam masyarakat. Dalam fungsi ini juga mencakup nilai fungsi pemulihan (Rehabilitasi).
- 3) Fungsi pengembangan (*Development*) Kesejahteraan sosial berfungsi untuk memberikan sumbangan langsung maupun tidak langsung dalam proses pembangunan atau pengembangan tatanan dan sumber-sumber daya sosial dalam masyarakat.

⁶⁰ D A, Augerah, DKK (2019). Arisan Rumah Sebagai Upaya Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus Di Desa Tambahrejo Barat, Gading Rejo, Pringsewu, Lampung). *Jurnal Pendidikan Sosiologi*. Hal 1-16

4) Fungsi Penunjang (*Supportive*) fungsi ini mencakup kegiatan-kegiatan untuk membantu mencapai tujuan sector atau bidang pelayanan kesejahteraan sosial yang lainnya.

1.6 Definisi Konseptual

Agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam proses penelitian ini, definisi konseptual dalam penelitian dibatasi pada:

1) Gerakan Sosial :

Gerakan sosial merupakan tindakan-tindakan kolektif yang memiliki tujuan atau klaim-klaim tertentu yang berorientasi pada perubahan dan bersifat ekstra/non-institusional yang memiliki tingkatan tertentu dan bersifat berkelanjutan. Dalam gerakan sosial terkadang juga mengandung gerakan politik perlawanan (*contentious politics*).

2) Civil Society:

Civil society merupakan masyarakat yang memiliki peradaban, dimana satu sama lainnya saling menopang, dengan kemandirian yang cukup tinggi sehingga mampu membentuk lembaga maupun asosiasi dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat yang bersifat bebas, independen dan tidak bergantung pada pemerintah atau Negara.

3) Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan masyarakat merupakan terpenuhinya kebutuhan materil, spiritual maupun sosial warga Negara agar dapat menghidupi dirinya atau keluarganya, dalam kondisi tidak tertekan dan terpenuhinya hak asasi manusia di setiap individu.

1.7 Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan suatu unsur-unsur penelitian yang berfungsi untuk memberikan batasan-batasan tertentu sebagai variabel pengukuran untuk mencapai tujuan penelitian.

Gerakan sosial ditunjukkan untuk menganalisis masalah sosial dalam rangka melakukan perubahan sosial. Sehingga peneliti akan menggunakan Teori Sidney Tarrow dari sudut pandang Gerakan social dengan menggunakan variable-variabel dibawah ini untuk melihat peran Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) Kabupaten Temanggung, variable-variabel tersebut ialah sebagai berikut:

Definisi Operasional

No	Variabel	Dimensi	Indikator
1.	Gerakan Sosial Mobilisasi Sumberdaya	1.Tantangan Kolekif	➤ Faktor melahirkan perlawanan
		2. Tujuan Bersama	➤ Tujuan dari gerakan sosial
		3. Solidaritas dan Identitas Kolektif	➤ Elemen yang tergabung ➤ Peran pemimpin
		4. Memelihara Politik Perlawanan	➤ Hasil dari gerakan sosial
2	Strategi Gerakan	1. Protes Politik	➤ Aksi Masa atau Gerakan Masa ➤ Negosiasi dan Lobby Politik
		2. Keterlibatan Kritis	➤ Efisiensi Kerjasama ➤ Advokasi ➤ Elit Politik ➤ Kesempatan Politik (<i>Political Opportunity</i>)

1.8 Metode Penelitian

Setelah menyusun kajian pustaka dan landaasan teori, langkah selanjutnya adalah menentukan dan menetapkan metode penelitian. Terkait penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif karena dalam penelitian ini penulis berusaha menjelaskan permasalahan yang dihadapi oleh manusia dalam dinamika kehidupan sosial yang disusun secara sistematis dan ilmiah.

Pada bagian ini bertujuan untuk menjelaskan proses dan cara kerja penelitian penulis selama dilapangan. Metode penelitian juga dapat diartikan sebagai sebuah cara bagaimana penelitian dilakukan secara terencana, dan sistematis untuk dapat mendapatkan data seperti dengan melakukan wawancara.

1.9 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. merujuk pada pernyataan Harold Garfinkel (1917) dalam penelitian kualitatif merupakan sebuah jenis penelitian yang bertujuan ununtuk dapat memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh sbujek penelitian secara holistic dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa. Sehingga di dalam penelitian ini peneliti mendapatkan data-data yang dibutuhkan berdasarkan hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumnetasi resmi⁶¹.

Bentuk dari penelitian ini adalah penelitian deskriptif, karena bertujuan untuk membuat keterangan secara sistematik berdasarkan data yang didapatkan

⁶¹ Semiawan, R. Conny Dr. Prof. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Grasindo, 2010, hal 49.

di lapangan baik berupa kalimat tulis atau lisan dari perilaku yang diamati yaitu Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) Kabupaten Temanggung dalam memerjuangkan petani tembakau.

1.9.1 Lokasi Penelitian

Penelitian akan dilakukan rumah Ketua Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) yaitu Bapak P, beralamatkan di Desa Wonosari, Kecamatan Bulu, Kabupaten Temanggung dan tempat-tempat kegiatan Asosiasi Petani Tembakau (APTI) Kabupaten Temanggung.

1.9.2 Unit Analisis

Menurut H.M.Nasir Hamzah, unit analisa merupakan sesuatu yang berkaitan dengan pusat atau bagian dari penelitian. Unit analisis dapat berupa individu, kelompok, benda, dan organisasi yang sesuai dengan fokus penelitian. Sesuai dengan pembahasan yang menjadi judul dalam penelitian ini maka unit analisisnya adalah Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) Kabupaten Temanggung⁶².

1.9.3 Jenis Data

Ada dua jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

a. Data Primer

Data primer yang diperoleh dengan melihat langsung objek yang akan diteliti melalui proses berupa wawancara

⁶² Ibid, hal 55.

dan hasil pengamatan langsung dilapangan. Sumber data utama ini diperoleh dari peran Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) Kabupaten Temanggung (tabel 1.5).

Tabel 1. 5 Data Primer

Teknik Pengumpula Data	No	Sumber Data
Wawancara	1	Ketua Umum Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI)
	2	Ketua Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) DPD Jawa Tengah
	3	Ketua Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) DPC Kabupaten Temanggung
	4	Anggota Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) DPC Kabupaten Temanggung
	5	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Kabupaten Temanggung
	6	Petani Tembakau Kabupaten Temanggung
	7	Industri Rokok Di Kabupaten Temanggung

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang dikutip penulis dari sumber lain melalui jurnal, buku, internet dan berbagai macam media yang dapat digunakan dalam perolehan data. Data tersebut digunakan untuk koheransi data primer yang kurang.

1.9.4 Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara merupakan sebuah metode pengumpulan data yang berupa pertemuan antara dua orang atau lebih secara langsung untuk bertukar informasi dan ide dengan melakukan tanya jawab secara lisan sehingga dapat dibangun makna dalam suatu topik tertentu Dengan menggunakan pendekatan purposive sampling, Sugiyono (2016) menjelaskan teknik purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu, seperti orang yang dianggap tahu tentang apa yang diharapkan⁶³.

Peneliti akan mendatangi langsung informan dan melakukan serangkaian tanya jawab dengan aktor-aktor yang berhubungan dengan peran Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) Kabupaten Temanggung.

Tabel 1. 6 Narasumber Wawancara

No	Narasumber	Nama
1.	Ketua Umum Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI)	Bapak. P
2.	Ketua Asosiasi Petani Tembakau Indonesai (APTI) DPD Jawa Tengah	Bapak. B
3.	Ketua Asosiasi Petani Tembakau Indonesai (APTI) DPC Kabupaten Temanggung	Bapak. K
4.	Anggota Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) DPC Kabupaten Temanggung	Bapak. A
5.	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Kabupaten Temanggung	Bapak. D
6.	Petani Tembakau di Kabupaten Temanggung	1. Bapak. R 2. Bapak. J 3. Bapak. T
7	Industri Rokok Di Kabupaten Temanggung	Bapak. R

⁶³ Sugiyono. *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*. Bandung, Alfabeta, 2015, Hal 300.

b. Dokumentasi

Menurut David Kolb, dokumentasi merupakan salah satu metode yang dilakukan melalui melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek maupun orang lain yang berkaitan dengan subjek. Tujuannya adalah untuk mendapatkan gambaran dari sudut pandang subjek melalui suatu media tulis atau dokumen lainnya yang ditulis atau dibuat oleh subjek atau pihak yang bersangkutan. Dokumentasi yang di dapatkan dalam penelitian ini berupa dokumen-dokumen dari hasil wawancara berupa catatan, buku, agenda, foto dan lainnya baik dari Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) Kabupaten Temanggung, petani tembakau yang ada di Kabupaten Temanggung atau dari Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Kabupaten Temanggung⁶⁴.

1.9.5 Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif pada hakekatnya merupakan sebuah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari wawancara, dan dokumentasi. Proses analisis data dan penafsiran data perlu dilakukan secepat mungkin hal tersebut dikarenakan untuk menjaga agar data jangan sampai kadaluwarsa atau terdapat hal penting lainnya yang terlupakan. Proses Analisis data

⁶⁴ Ibid, Hal 65-61.

menggunakan model Analysis Interactive dari Miles dan Huberman dilakukan melalui tiga proses⁶⁵, yaitu:

a. Reduksi Data

Reduksi data adalah bagian dari proses analisis berupa merangkum, pemilihan hal-hal pokok, pemusatan perhatian dengan memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari pola dan temanya sehingga dalam mereduksikan data akan mendapatkan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk mengumpulkan data.

b. Penyajian Data

Merupakan sekumpulan data atau informasi yang memungkinkan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dengan melihat penyajian data dari data yang sudah di reduksi maka peneliti dapat memahami apa yang sedang terjadi serta apa yang sebaiknya dilakukan berdasarkan pemahanan peneliti dalam penyajian data-data tersebut.

c. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi

Kesimpulan yang bersifat final mungkin tidak akan ditemukan sampai pada pengumpulan data terakhir, hal tersebut bergantung pada besarnya kumpulan-kumpulan catatan lapangan. Dalam melakukan penarikan kesimpulan

⁶⁵ Ilyas (2016). Pendidikan Karakter Melalui Homeschooling. *Journal of Nonformal Education*, Vol. 2 No. 1, Hlm 91-98.

peneliti juga melakukan verifikasi selama penelitian berlangsung, dimana makna-makna yang muncul dari data yang diperoleh harus diuji kebenarannya, kekuatannya dan kecocokannya sehingga menghasilkan data yang berkualitas. Penarikan kesimpulan merupakan hasil dari suatu proses penelitian yang tidak dapat dipisahkan dari proses-prose sebelumnya. Sehingga ketiga langkah tersebut menjadi acuan dalam menganalisis data yang diperoleh sehingga menjadi lebih sistematis, akurat dan jelas.

1.10 Sistematika Pembahasan

Guna mempermudah pemahaman hal-hal yang dibahas dalam penelitian ini, maka akan penulis uraikan secara jelas sistematika dalam penulisan skripsi ini. Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan

Menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka dasar teori, definisi konseptual, definisi operasional serta metode penelitian.

Bab II: Deskripsi Objek Penelitian

Menguraikan tentang penjelasan secara singkat terkait lokasi penelitian dan objek penelitian yang dituju.

Bab III: Hasil Penelitian dan Pembahasan

Menguraikan hasil penelitian yang diperoleh dari wawancara dan menganalisis isu-isu yang ada terkait regulasi pemerintah yang dalam upaya pengendalian rokok maupun tembakau, serta mengenai peran Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) Di Kabupaten Temanggung dalam melindungi dan memperjuangkan kepentingan petani tembakau di Kabupaten Temanggung, kemudian hasil penelitian tersebut dianalisis.

Bab IV: Penutup

Menguraikan tentang kesimpulan yang diambil dari hasil penelitian yang telah dilakukan dan memberikan saran untuk pengembangan lebih lanjut.